

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**



## **BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

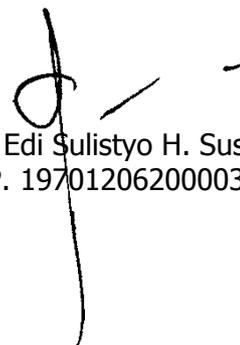
## KATA PENGANTAR

Sumber daya manusia (SDM) lingkungan hidup dan kehutanan harus dapat menjawab berbagai tantangan yang semakin berat antara lain kompetisi di pasar global, peningkatan aneka fungsi kehutanan dan jasa lingkungan, pendidikan dan kesadaran lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dibutuhkan strategi secara berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang tangguh dan *competitive*. Salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan menyusun dan mengembangkan program-program diklat lingkungan hidup dan kehutanan sejalan dengan permasalahan yang semakin kompleks dan tuntutan yang terus berkembang.

Untuk menjawab berbagai permasalahan kaitannya dengan tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menyusun langkah strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Balai Diklat LHK Makassar mengaju pada target RPJMN tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024. Renstra Balai Diklat LHK Makassar juga berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2024 – 2024.

Semoga Rencana Strategis Balai Diklat LHK Makassar Tahun 2020-2024 dapat menjadi *road map* untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM lingkungan dan kehutanan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kekuatan bagi kita semua dalam mengemban amanah dan tugas mulia dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan.

Kepalai Balai,



Dr. Edi Sulisty H. Susetyo, S.Hut, M.Si  
NIP. 197012062000031004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Kondisi Umum .....	1
B. Potensi dan Permasalahan .....	9
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024 .....	13
A. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK .....	1
B. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BP2SDM .....	9
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN .....	21
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	25
BAB V. PENUTUP .....	28
LAMPIRAN	
Matrik Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Kondisi Umum**

#### **A. Wilayah Layanan**

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar merupakan perubahan dari nomenklatur organisasi sebelumnya yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan di mana terjadi perubahan setelah penggabungan 2 Kementerian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan). Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar memiliki 10 wilayah pelayanan yang tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua. Wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur organisasi, maka cakupan layanan Balai Diklat LHK Makassar tidak hanya UPT/dinas yang mengurus kehutanan di kabupaten/kota tetapi juga badan lingkungan hidup daerah yang ada di wilayah pelayanan.

#### **B. Capaian Kegiatan Hingga 2019**

Realisasi capaian kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Balai Diklat Kehutanan Makassar Tahun 2015-2019 menjadi salah satu acuan dalam penetapan target sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

##### **1. Pelaksanaan anggaran**

Anggaran pada DIPA satker Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar tahun 2015-2019 secara umum diperuntukan bagi pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, penyelenggaraan diklat, pengelolaan pendidikan, pengembangan kelembagaan dan pengadaan sarana prasarana diklat.

## 2. Penyelenggaraan diklat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM kehutanan, Balai Diklat Kehutanan Makassar menyelenggarakan diklat kehutanan yang terdiri atas Diklat Aparatur, Diklat Non Aparatur dan Diklat Pola Kerjasama dengan Instansi/Lembaga yang lain baik dari dalam Kementerian kehutanan maupun dari luar Kementerian kehutanan

## 2. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

Salah satu faktor determinan yang mendukung keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia melalui kegiatan diklat adalah potensi yang dimiliki oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Potensi tersebut antara lain : sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.

#### a. Sumberdaya Manusia

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar merupakan unit eselon III pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan UPT dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sampai dengan tahun 2019 jumlah pegawai di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar sebanyak 88 dengan rincian sebagai berikut:

#### b. Sarana dan Prasarana Diklat

Balai Diklat LHK Makassar memiliki sarana prasarana kediklatan yang berada di 2 (dua) lokasi yaitu di Kampus Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan di Kampus Tabo-Tabo, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep. Sarana prasarana berupa fasilitas perkantoran dan fasilitas diklat berupa asrama, ruang kelas, perpustakaan, aula, ruang makan, serta sarana penunjang lainnya.

Tabel 3. Fasilitas/Sarana kediklatan Balai Diklat LHK Makassar di Kampus Sudiang, Makassar

NO.	JENIS	UNIT	KAPASITAS
1	Gedung Kantor	1	-
2	Ruang Kelas	6	170 orang
3	Ruang Sekretariat	2	10 orang
4	Perpustakaan	1	15 orang
5	Aula	1	250 orang
6	Asrama	3	105 orang
7	Ruang Makan	1	150 orang
8	Mesjid	1	100 orang
9	Mess	1	21 orang
10	Joglo	2	60 orang
11	Tower Air	3	24 M3
12	Pos Jaga	1	-
13	Garasi	2	-

Tabel 4. Fasilitas/Sarana Kediklatan Balai Diklat LHK Makassar di Kampus Hutan Diklat Tabo-Tabo, Kab. Pangkep

NO.	JENIS	UNIT	KAPASITAS
1	Ruang Kelas	3	90 orang
2	Aula	1	200 orang
3	Asrama	2	84 orang
4	Mess	1	7 orang
5	Ruang Makan dan dapur	1	150 orang
6	Guest House	4	16 orang
7	Mesjid	1	100 orang
8	Pos Jaga	1	-
9	Bak Penampungan Air	1	18 M3
10	Menara Pengawas Kebakaran	1	-
11	Kandang Rusa	1	12 ekor
12	Kandang Sapi	1	3 ekor
13	Dome Kupu-kupu	1	24 m <sup>2</sup>
14	Gazebo	4	40 orang



Di kawasan Hutan diklat Tabo-Tabo telah dibangun beberapa unit demplot untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan LHK. Beberapa demplot yang terdapat di hutan diklat Tabo-Tabo adalah :

1. Demplot Mahoni
2. Demplot Reboisasi Mahoni
3. Demplot Eboni lokal
4. Demplot jati propenan
5. Demplot uji coba jati
6. Demplot Shorea sp (Meranti)
7. Demplot kebakaran hutan
8. Demplot Agroforestry
9. Demplot jenis tanaman obat

## **2. Permasalahan**

Disamping beberapa potensi yang dapat dijadikan modal dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan lima tahun ke depan, masih ditemui beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut harus bisa diatasi dalam kurun waktu 2020-2024. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain:

- Belum tersedianya kurikulum serta modul-modul diklat yang berbasis kompetensi
- Kegiatan IKD dan EPD terkendala oleh luasnya wilayah pelayanan dan keterbatasan dana
- Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat
- Kurangnya fasilitas teknologi informasi yang memadai.
- Belum terbangunnya budaya kerja organisasi yang berorientasi pada pelayanan.

## **Analisis SWOT**

Sasaran kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar didasarkan pada rujukan kondisi lingkungan strategis yang meliputi faktor internal maupun eksternal organisasi yang dianalisis melalui pendekatan SWOT. Analisis internal meliputi penilaian pada faktor kekuatan dan kelemahan, sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang dan tantangan.

### **1. Lingkungan Strategis Internal**

#### **a. Kekuatan**

Kekuatan merupakan kelebihan yang dimiliki Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar. Kekuatan tersebut apabila dimanfaatkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kekuatan yang dimiliki Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar adalah :

- 1) Tersedianya tenaga kediklatan yang terdiri atas tenaga pengelola (pejabat struktural dan non struktural) sebanyak 53 orang, tenaga widyaiswara sebanyak 22, fungsional penyuluh kehutanan 1 orang, fungsional pengada barang dan jasa 1 orang, dan upahan 19 orang.
- 2) Tersedianya fasilitas diklat berupa gedung perkantoran, gedung pendidikan (kelas, aula, perpustakaan,dll.), asrama, dapur, ruang makan beserta kelengkapannya, hutan diklat, dan peralatan praktek.
- 3) Tersedianya hutan diklat sebagai sarana praktek, demplot, ekowisata, pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan.
- 4) Tersedianya dana tetap penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan yang bersumber dari anggaran negara dan dana tidak tetap dari pihak lain dalam format kerjasama kediklatan.
- 5) Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan diklat dengan unit-unit kerja lingkup Kementerian LHK, pemerintah daerah dan instansi/lembaga lain yang terkait.

#### **b. Kelemahan**

- 1) Belum semua kurikulum berdasarkan diklat berbasis kompetensi.

- 2) Belum tersedia modul untuk diklat – diklat teknis.
- 3) Belum semua jenis diklat berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis dan administrasi, atau belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) sulit dilaksanakan sesuai pedoman karena keterbatasan dana.
- 5) Hasil Evaluasi Pasca Diklat (EPD) belum secara fungsional dijadikan acuan penyempurnaan penyelenggaraan diklat.
- 6) Kurangnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana diklat.
- 7) Lemahnya kemampuan mengelola sarana dan prasarana diklat.
- 8) Kurangnya pengalaman lapangan widyaiswara yang menunjang peningkatan kompetensi dan kapabilitas sesuai bidang masing – masing.
- 9) Belum terbangunnya budaya kerja organisasi yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan.
- 10) Fasilitas teknologi informasi yang belum memadai.

## **2. Lingkungan Strategis Eksternal**

### **a. Peluang**

- 1) Terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berimplikasi terhadap bertambahnya kebutuhan SDM kehutanan pada semua tingkatan.
- 2) Perubahan nomenklatur kementerian, berimplikasi pada semakin luasnya tugas pembinaan SDM aparatur.
- 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan pesat mempengaruhi wawasan, cara berpikir dan tata nilai yang memerlukan peningkatan daya saing SDM.
- 4) Penerapan otonomi daerah yang berimplikasi terhadap perubahan tata administrasi publik memerlukan dukungan diklat guna meningkatkan kualitas SDM LHK pada dinas/instansi pemerintah daerah.

- 5) Meningkatnya usaha bidang kehutanan memerlukan pengetahuan, keterampilan teknis dan manajemen, baik di sektor industri kehutanan hulu maupun hilir.
- 6) Meningkatnya perhatian masyarakat pada bidang konservasi dan lingkungan sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai konservasi sumberdaya alam.
- 7) Implementasi konvensi-konvensi internasional di bidang kehutanan dan lingkungan global memerlukan dukungan SDM yang profesional.

**b. Ancaman/Tantangan**

- 1) Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat SDM LHK dengan Balai Diklat LHK.
- 2) Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir SDM aparatur LHK.
- 3) Tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga kediklatan serta tenaga kediklatan berimplikasi munculnya tingkat persaingan yang sangat kompetitif.
- 4) Adanya kebijakan penyelenggaraan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian.
- 5) Penyelenggaraan diklat masih dipandang sebagai kegiatan *cost center*, belum dipandang sebagai *human capital* yang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi.
- 6) Heterogenitas budaya, adat istiadat, keadaan wilayah serta akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan menuntut adanya sistem, pola, prosedur, metoda, teknik dan pendekatan serta cara yang berbeda-beda pula.

## Analisis Lingkungan Strategis

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya tenaga kediklatan yang terdiri atas tenaga pengelola (pejabat struktural dan non struktural) 53 orang, widyaiswara 22 orang, fungsional penyuluh kehutanan 1 orang, fungsional pengada barang dan jasa 1 orang serta tenaga upahan 19 orang.</li> <li>2. tersedianya fasilitas diklat berupa gedung perkantoran, gedung pendidikan (kelas, aula, perpustakaan,dll.), asrama, dapur, ruang makan beserta kelengkapannya, hutan diklat, peralatan praktek diklat, sarana transportasi dan komunikasi yang relatif memadai.</li> <li>3. Tersedianya dana tetap penyelenggaraan diklat lingkungan hidup dan kehutanan yang bersumber dari anggaran negara dan dana tidak tetap dari pihak lain dalam format kerjasama kediklatan.</li> <li>4. Terjalinnnya koordinasi penyelenggaraan diklat dengan unit-unit kerja lingkup Kementerian LHK, pemerintah daerah dan instansi/lembaga lain yang terkait.</li> <li>5. Tersedianya hutan diklat sebagai sarana praktek, demplot, ekowisata, pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua kurikulum berdasarkan diklat berbasis kompetensi.</li> <li>2. Belum tersedia modul untuk diklat – diklat teknis.</li> <li>3. Belum semua jenis diklat berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis dan administrasi, atau belum mengarah pada peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>4. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) belum dilaksanakan sesuai pedoman karena keterbatasan dana.</li> <li>5. Hasil Evaluasi Pasca Diklat (EPD) belum sepenuhnya dijadikan acuan penyempurnaan penyelenggaraan diklat.</li> <li>6. Kurangnya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana diklat.</li> <li>7. Lemahnya kemampuan mengelola sarana dan prasarana diklat.</li> <li>8. Kurangnya pengalaman lapangan widyaiswara yang menunjang peningkatan kompetensi dan kapabilitas sesuai bidang masing – masing.</li> <li>9. Belum terbangunnya budaya kerja organisasi yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan.</li> <li>10. Fasilitas teknologi informasi yang belum memadai.</li> </ol>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Ancaman (Threat)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berimplikasi terhadap bertambahnya kebutuhan SDM kehutanan pada semua tingkatan.</li> <li>2. berubahnya nomenklatur kementerian, berimplikasi semakin luasnya tugas pembinaan SDM aparatur.</li> <li>3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi wawasan, cara berpikir dan tata nilai yang memerlukan peningkatan daya saing SDM.</li> <li>4. Penerapan otonomi daerah yang berimplikasi pada perubahan tata administrasi publik memerlukan dukungan diklat guna meningkatkan kualitas SDM LHK pada dinas/instansi pemerintah daerah.</li> <li>5. Meningkatnya usaha bidang kehutanan memerlukan pengetahuan, keterampilan teknis dan manajemen, baik di sektor industri kehutanan hulu maupun hilir.</li> <li>6. Meningkatnya perhatian masyarakat pada bidang konservasi dan lingkungan sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai konservasi sumberdaya alam.</li> <li>7. Implementasi konvensi-konvensi internasional di bidang kehutanan dan lingkungan global memerlukan dukungan SDM yang profesional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum jelasnya pembagian yurisdiksi diklat antara Pusdiklat SDM LHK dengan Balai Diklat LHK</li> <li>2. Diklat belum menjadi bagian dari sistem karir SDM aparatur LHK.</li> <li>3. Tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga kediklatan serta tenaga kediklatan berimplikasi munculnya tingkat persaingan yang sangat kompetitif.</li> <li>4. Adanya kebijakan pelaksanaan diklat oleh lembaga non diklat lingkup kementerian.</li> <li>5. Penyelenggaraan diklat masih dipandang sebagai kegiatan <i>cost center</i>, belum dipandang sebagai <i>human capital</i> yang memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi.</li> <li>6. Heterogenitas budaya, adat istiadat, keadaan wilayah serta akses terhadap sumberdaya hutan menuntut adanya sistem, pola, prosedur, metoda, teknik dan pendekatan serta cara yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran.</li> </ol>

Tabel 6. Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan

<b>Strategi memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang ada:</b>	<b>Strategi memanfaatkan peluang dengan menanggulangi kelemahan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan diklat untuk memenuhi peningkatan kompetensi SDM di KPH</li> <li>2. Mengidentifikasi kebutuhan diklat bidang lingkungan hidup</li> <li>3. Meningkatkan promosi diklat pada stakeholder</li> <li>4. Mengembangkan jenis-jenis diklat yang dapat memenuhi tuntutan/kebutuhan pengguna diklat.</li> <li>5. Mengoptimalkan potensi hutan diklat sebagai sarana pembelajaran</li> <li>6. Mengembangkan program – program diklat bidang LH</li> <li>7. Mengembangkan program diklat bidang wirausaha kehutanan</li> <li>8. Membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kurikulum diklat sesuai perkembangan teknologi</li> <li>2. Menyusun modul – modul diklat yang sesuai dengan kurikulum</li> <li>3. Meningkatkan pengalaman lapangan widyaiswara</li> <li>4. Meningkatkan kualitas fasilitas teknologi informasi</li> <li>5. Menyempurnakan perangkat kediklatan sesuai hasil Evaluasi Pascadiklat (EPD).</li> <li>6. Mengembangkan kerjasama diklat dengan dinas yang menangani LHK</li> <li>7. Meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan melalui magang</li> <li>8. Melengkapi fasilitas praktek diklat teknis di hutan diklat</li> </ol>
<b>Strategi mengatasi ancaman dengan kekuatan yang ada:</b>	<b>Strategi mengurangi kelemahan dan mengatasi ancaman :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kediklatan, sarana prasarana dan teknologi kediklatan serta hutan diklat untuk mendukung terlaksananya diklat yang berkualitas.</li> <li>2. Mendesain metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta</li> <li>3. Meningkatkan sinkroniasi dan kolaborasi para pihak dalam menyelenggarakan diklat kehutanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun komunikasi dengan lembaga non diklat di wilayah layanan</li> <li>2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat melalui pendayagunaan tenaga kediklatan.</li> <li>3. Meningkatkan keterampilan user dalam melakukan IKD</li> <li>4. Mengoptimalkan hasil EPD untuk perbaikan penyelenggaraan diklat.</li> </ol>

Berdasarkan analisis SWOT di atas, dilakukan uji keterkaitannya dengan sasaran program, sasaran kegiatan, dan tata nilai. Tata nilai yang digunakan meliputi: 1) integritas, 2) etos kerja, dan 3) gotong royong.

Tabel 7. Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

No.	Identifikasi penilaian	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan		NILAI			FKK
		1	2	2	6	1	2	3	
<b>1</b>	<b>Strategi memanfaatkan peluang dengan kekuatan yang ada (S-O)</b>								
1.1	Menyelenggarakan diklat untuk memenuhi peningkatan kompetensi SDM di KPH	4	4	4	2	3	3	3	23
1.2	Mengidentifikasi kebutuhan diklat bidang lingkungan hidup	3	4	4	3	3	2	3	22
1.3	Meningkatkan promosi diklat pada stakeholder	4	3	2	2	2	4	3	20
1.4	Mengembangkan jenis-jenis diklat yang dapat memenuhi tuntutan/ kebutuhan pengguna diklat.	3	3	4	3	4	4	3	24
1.5	Mengoptimalkan potensi hutan diklat sebagai sarana pembelajaran	4	4	3	4	3	4	3	25
1.6	Mengembangkan program – program diklat bidang LH	3	4	4	2	4	3	4	24
1.7	Mengembangkan program diklat bidang wirausaha kehutanan	4	3	4	3	4	4	4	26
1.8	Membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan	3	4	3	4	3	3	4	24
<b>2</b>	<b>Strategi mengatasi ancaman dengan kekuatan yang ada (S-T)</b>								
2.1	Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kediklatan, sarana prasarana dan teknologi kediklatan serta hutan diklat untuk mendukung terlaksananya diklat yang berkualitas.	2	3	4	3	4	4	4	24
2.2	Mendesain metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan karekteristik peserta	2	3	4	3	3	4	3	22
2.3	Meningkatkan sinkroniasi dan kolaborasi para pihak dalam menyelenggarakan diklat kehutanan.	4	3	3	4	4	4	4	26
<b>3</b>	<b>Strategi memanfaatkan peluang dengan menanggulangi kelemahan (W-O)</b>								
3.1	Menyusun kurikulum diklat sesuai perkembangan teknologi	2	3	4	3	3	4	3	22
3.2	Menyusun modul – modul diklat yang sesuai dengan kurikulum	2	3	4	3	3	3	3	21
3.3	Meningkatkan pengalaman lapangan widyaiswara	2	3	4	3	4	4	4	24
3.4	Meningkatkan kualitas fasilitas teknologi informasi	2	3	4	3	3	4	3	23

3.5	Menyempurnakan perangkat kediklatan sesuai hasil Evaluasi Pascadiklat (EPD)	2	3	4	3	4	4	3	24
3.6	Mengembangkan kerjasama diklat dengan SKPD yang menangani LHK	4	3	4	4	4	4	4	27
3.7	Meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan melalui magang	2	3	4	3	4	4	4	24
3.8	Melengkapi fasilitas praktek diklat teknis di hutan diklat	4	4	4	3	3	3	3	24
<b>4</b>	<b>Strategi mengurangi kelemahan dan menanggulangi ancaman (W-T)</b>								
4.1	Membangun komunikasi dengan lembaga non diklat di wilayah layanan	4	3	4	3	3	3	4	24
4.2	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat melalui pendayagunaan tenaga kediklatan.	3	3	3	4	4	4	3	24
4.3	Meningkatkan keterampilan user dalam melakukan IKD	2	2	4	3	4	3	4	22
4.4	Mengoptimalkan hasil EPD untuk perbaikan penyelenggaraan diklat.	2	3	4	3	3	4	3	22

Penilaian keterkaitan dibuat pada skala 1 – 4, dengan klasifikasi 1 : tidak terkait, 2 : kurang terkait, 3 : terkait, dan 4 : sangat terkait.

Berdasarkan hasil identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan disusunlah langkah operasional untuk melaksanakan kegiatan kediklatan, yaitu :

1. Mengembangkan kerjasama diklat dengan SKPD yang menangani LHK (3.6).
2. Meningkatkan sinkroniasi dan kolaborasi para pihak dalam menyelenggarakan diklat kehutanan (2.3).
3. Mengembangkan program diklat bidang wirausaha kehutanan (1.7).
4. Mengoptimalkan potensi hutan diklat sebagai sarana pembelajaran (1.5).
5. Mengembangkan jenis-jenis diklat yang dapat memenuhi tuntutan/kebutuhan pengguna diklat (1.4).
6. Mengembangkan program – program diklat bidang LH (1.6).
7. Membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan (1.8).
8. Mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kediklatan, sarana prasarana dan teknologi kediklatan serta hutan diklat untuk mendukung terlaksananya diklat yang berkualitas. (2.1).
9. Meningkatkan pengalaman lapangan widyaiswara (3.3).

10. Menyempurnakan perangkat kediklatan sesuai hasil Evaluasi Pasca Diklat (EPD) (3.5).
11. Meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan melalui magang (3.7).
12. Melengkapi fasilitas praktek diklat teknis di hutan diklat (3.8).
13. Membangun komunikasi dengan lembaga non diklat di wilayah layanan (4.1)
14. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan diklat melalui pendayagunaan tenaga kediklatan (4.2).
15. Menyelenggarakan diklat untuk memenuhi peningkatan kompetensi SDM di KPH (1.1).
16. Meningkatkan kualitas fasilitas teknologi informasi (3.4).
17. Mengidentifikasi kebutuhan diklat bidang lingkungan hidup (1.2).
18. Mendesain metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan karekteristik peserta (2.2).
19. Menyusun kurikulum diklat sesuai perkembangan teknologi (3.1).
20. Meningkatkan keterampilan user dalam melakukan IKD (4.3).
21. Mengoptimalkan hasil EPD untuk perbaikan penyelenggaraan diklat (4.4).
22. Menyusun modul – modul diklat yang sesuai dengan kurikulum (3.2).
23. Meningkatkan promosi diklat pada stakeholder (1.3).

**BAB III**  
**KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN**

**Sasaran dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan**

Berdasarkan sasaran program BP2SDM maka Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar selaku UPT dari Kementerian LHK menetapkan sasaran unit kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat (UK1)
2. Peningkatan Sarana dan Evaluasi Diklat (UK2)
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (UK3)

Dari sasaran kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar dijabarkan dalam sasaran elemen kegiatan antara lain:

Tabel 8. Unit Kegiatan/Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan

<b>Unit Kegiatan/ Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Unit Kegiatan</b>
<b>Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat (UK1)</b>	
1. Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)	a. Tersedianya data SKKNI di bidang LHK b. Tersusunnya questioner pengumpulan data IKD c. Terlaksananya pengumpulan data IKD d. Jumlah calon peserta diklat sesuai jenis diklat yang akan dilaksanakan e. Tersusunnya laporan hasil IKD
2. Tersusunnya rencana, program dan anggaran diklat	a. Tersedianya Renstra Satker b. Tersusunnya Renja Satker c. Tersedianya Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAKL) d. Tersedianya data dukung Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAKL)
3. Terselenggaranya diklat aparatur LHK	a. Tersedianya desain program diklat b. Tersedianya pedoman penyelenggaraan diklat c. Tersedianya kurikulum dan silabus diklat berbasis kompetensi d. Tersedianya modul-modul diklat teknis

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Tersedianya laporan pelaksanaan diklat</li> <li>f. Tersedianya pendukung kediklatan</li> <li>g. Lulusan diklat aparatur</li> <li>h. Lulusan diklat Bakti Rimbawan</li> <li>i. Lulusan diklat KTH</li> </ul>
4. Terlaksananya kerjasama diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbangunnya kesepakatan pengembangan SDM (MoU)</li> <li>b. Terbangunnya kerjasama penyelenggaraan diklat (PKS)</li> </ul>
<b>Peningkatan Sarana dan Evaluasi Diklat (UK2)</b>	
5. Terkelolanya sarana dan prasarana diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terkelolanya pemanfaatan gedung dan bangunan</li> <li>b. Terkelolanya persemaian</li> <li>d. Pengembangan sarana kediklatan</li> </ul>
6. Terkelolanya hutan diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Renja Pengelolaan hutan diklat</li> <li>b. Terkelolanya Demplot sebagai sarana pembelajaran</li> <li>c. Pengembangan demplot hutan diklat</li> <li>d. Peningkatan SDM pengelola hutan diklat</li> <li>e. Pemberdayaan kelompok tani hutan</li> <li>f. Perlindungan dan pengamanan kawasan</li> <li>g. Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar</li> <li>h. Penyuluhan masyarakat sekitar hutan</li> </ul>
7. Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat (EPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring pelaksanaan diklat</li> <li>b. Tersedianya angket evaluasi diklat</li> <li>c. Tersusunnya quetioner EPD</li> <li>d. Terlaksananya kegiatan EPD</li> <li>e. Tersusunnya laporan hasil EPD</li> </ul>
8. Tersusunnya pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersusunnya laporan instansi</li> <li>b. Tersusunnya laporan keuangan</li> </ul>
9. Terlaksananya pelayanan data dan informasi diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya data dan informasi</li> <li>b. Terbitnya majalah</li> <li>c. Terkelolanya perpustakaan</li> <li>d. Terpeliharanya jaringan internet</li> <li>e. Tersedianya info diklat</li> </ul>
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya (UK3)</b>	
10. Terlaksananya urusan surat menyurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan surat masuk dan surat keluar</li> <li>b. Pengolahan surat masuk/keluar</li> <li>c. Pengiriman surat masuk/keluar</li> <li>d. Dokumentasi surat masuk/keluar</li> </ul>

11. Terlaksananya urusan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan laporan semester</li> <li>b. Administrasi data-data informasi, mutasi, formasi, penempatan, alih tugas, pemberhentian, KGB, cuti, SPMT, KP, BUP, Ijin belajar, Pengaktifan kembali WI, Karpeg, Karis/Karsu, Satyalancana, SK. personalia, ralat SK, Taspen, dan pengembangan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>c. Simpeg dan SAPK</li> <li>d. Pembuatan rekap absen</li> <li>e. E-Formasi dan E-PUPNS</li> <li>f. Penyusunan Laporan SPIP</li> <li>g. Pelaksanaan verifikasi usulan DUPAK Wi</li> <li>h. Penyusunan ANJAB, evaluasi dan faktor jabatan</li> </ul>
12. Terlaksananya urusan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan SPM</li> <li>b. Pembukuan bendahara</li> <li>c. Pembuatan laporan keuangan</li> <li>d. Pembayaran gaji pegawai</li> </ul>
13. Terkelolanya perlengkapan dan administrasi barang milik negara dan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi Barang Milik Negara</li> <li>b. Terpeliharanya barang inventaris, kendaraan operasional dan gedung/bangunan, jaringan listrik dan air</li> <li>c. Tersimpannya dengan aman dan rapi barang milik negara</li> <li>d. Pembuatan laporan semester</li> <li>e. Pembuatan laporan tahunan</li> </ul>
14. Peningkatan kapasitas tenaga fungsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya kajian kediklatan</li> <li>b. Terlaksananya kegiatan magang/studi banding</li> </ul>

Dari sasaran kegiatan Balai Diklat LHK Makassar dijabarkan dalam sasaran elemen kegiatan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Terselenggaranya diklat teknis dan fungsional bagi SDM LHK, tersedianya perencanaan program dan anggaran diklat, tersedianya IKD, kurikulum dan materi diklat serta terjalinnnya kerjasama diklat dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas alat praktek, alat bantu pembelajaran, terlaksananya EPD, evaluasi, pemantauan dan pelaporan,

tersedianya sistem informasi, e-learning, teleconference penyelenggaraan diklat dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Meningkatnya kuantitas maupun kualitas tenaga pengelola diklat dan widyaiswara, tersedianya sarpras dan SOP tugas pada Balai Diklat LHK Makassar serta membuat usulan rekomendasi yang mendukung pendayagunaan SDM kehutanan yang kompeten dalam mendukung 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **A. Kerangka Regulasi**

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM kerangka regulasi yang di butuhkan oleh Balai Diklat LHK Makassar adalah:

No.	Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Perlunya Regulasi
1	Diperlukan pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat (AKD) dan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)	Agar pelaksanaan AKD dan IKD pada level individu berguna sebagai dasar desain pembelajaran
2	Diperlukan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat kerjasama	Sebagai landasan Penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BDLHK dengan para mitra
3	Diperlukan petunjuk teknis penyusunan kurikulum diklat LHK	Sebagai dasar penyusunan kurikulum diklat berbasis kompetensi
4	Diperlukan revisi terhadap pedoman penyusunan modul diklat	Agar dapat menunjang proses pembelajaran diklat berbasis kompetensi

Tabel 9. Kerangka Regulasi dan Urgensi Perlunya Regulasi

### **B. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 disebutkan bahwa Balai Diklat LHK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Balai Diklat LHK Makassar menyelenggarakan fungsi:

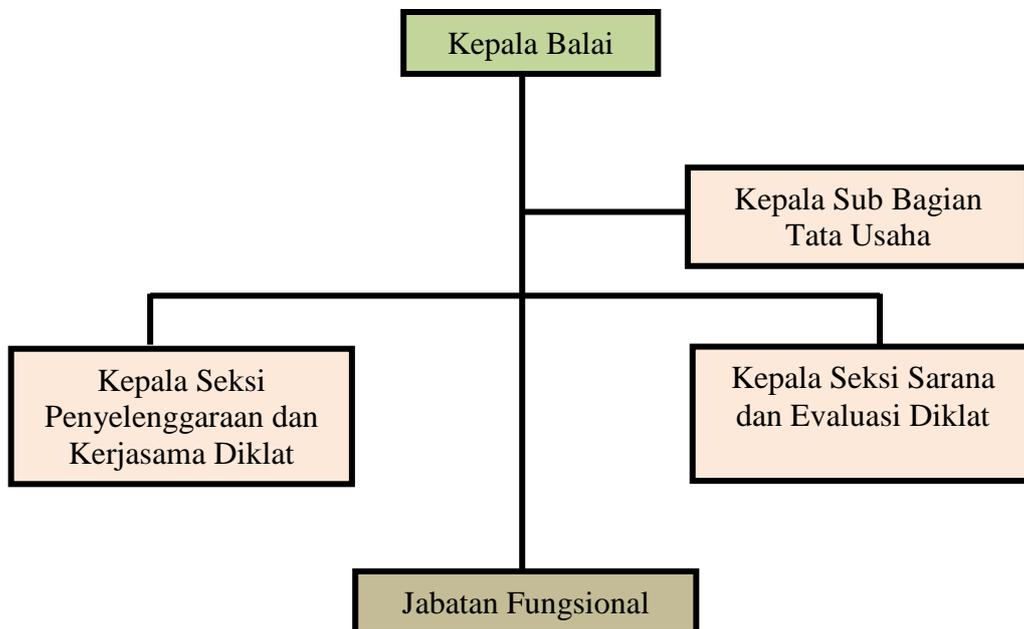
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan;

7. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Kebutuhan diklat lingkungan hidup dan kehutanan bagi masyarakat dan dunia usaha, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dipandang masih besar. Oleh karena itu kapasitas Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar dalam melakukan diklat bagi masyarakat atau dunia usaha perlu ditingkatkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Balai Diklat Kehutanan Makassar memiliki Susunan Organisasi yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Sarana Hutan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan administrasi barang milik negara dan rumah tangga. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan. Seksi Sarana dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi pasca diklat (EPD) dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

### **C. Kerangka Pendanaan**

Operasionalisasi seluruh kegiatan kediklatan akan berjalan efektif apabila didukung oleh ketersediaan dan alokasi anggaran yang memadai. Sumber utama anggaran pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan diklat lingkungan hidup dan kehutanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pembiayaan yang berasal dari pihak ketiga seperti bantuan luar negeri, kerjasama kediklatan baik dengan dinas terkait, pemerintah daerah maupun NGO, serta pihak-pihak lain dalam skema kerjasama melalui MOU tidak dapat diprediksi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Akan tetapi, peluang untuk menggali sumber pembiayaan alternatif melalui skema kerja sama cukup terbuka.

Anggaran selama 5 (lima) tahun tersebut terbagi dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan diklat, pembayaran gaji dan tunjangan, biaya operasional, pengadaan belanja modal serta biaya lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang berintegritas, memiliki etos kerja tinggi, dan semangat gotong royong merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sampai ke tingkat tapak. Upaya untuk mewujudkan profesionalisme SDM lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung akselerasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan suatu proses peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Diklat sebagai suatu proses pembelajaran harus dipahami sebagai titik sentral dari mainstream pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, renstra juga memperhitungkan berbagai kecenderungan yang diprediksi akan terjadi di masa depan. Berhasilnya implementasi renstra sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan, upaya dan kerja keras yang sungguh-sungguh dari segenap unsur jajaran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, serta dukungan dari unit eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

# LAMPIRAN

